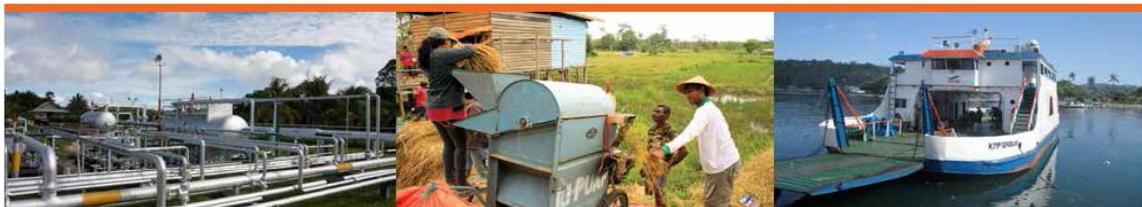
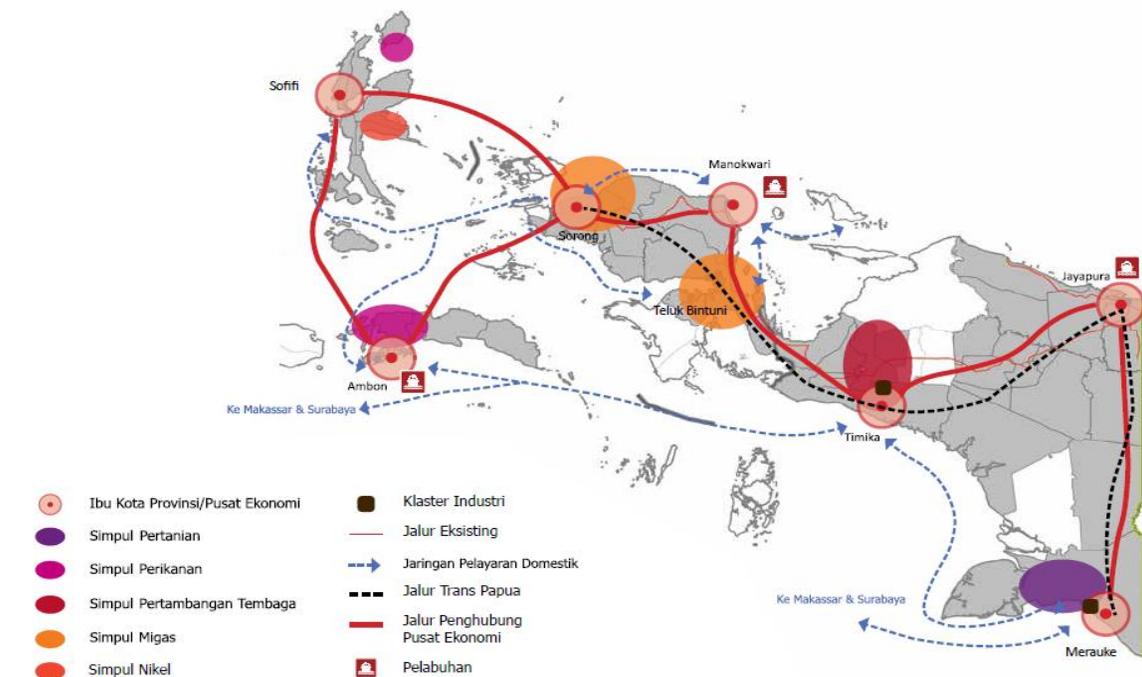




PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 238 -

Koridor Ekonomi Papua dan Kepulauan Maluku	Tema Pembangunan: <i>Pusat Pengembangan Pangan, Perikanan, Energi, dan Pertambangan Nasional</i>	Terdiri dari 7 Pusat Ekonomi: <ul style="list-style-type: none">• Sofifi• Ambon• Sorong• Manokwari• Timika• Jayapura• Merauke	Kegiatan Ekonomi Utama: <ul style="list-style-type: none">• Pertanian Pangan - MIFEE• Tembaga• Nikel• Minyak dan Gas Bumi• Perikanan
---	--	--	---



G. Koridor Ekonomi Papua – Kepulauan Maluku

1. Overview Koridor Ekonomi Papua – Kepulauan Maluku

Koridor Ekonomi Papua dan Kepulauan Maluku terdiri dari Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara. Tema pembangunan Koridor Ekonomi Papua dan Kepulauan Maluku adalah sebagai **Pusat Pengembangan Pangan, Perikanan, Energi, dan Pertambangan Nasional**. Secara umum, Koridor Ekonomi Papua dan Kepulauan Maluku memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, namun di sisi lain terdapat beberapa masalah yang harus menjadi perhatian dalam upaya mendorong perekonomian di koridor ini, antara lain:

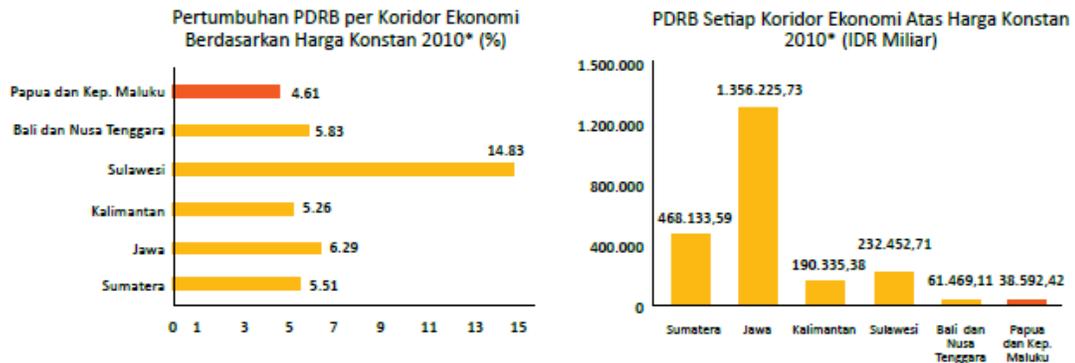
- Laju pertumbuhan PDRB di Koridor Ekonomi Papua dan Kepulauan Maluku dari tahun 2009-2010 menjadi yang terendah dibandingkan koridor ekonomi lainnya, yakni sebesar 4,61 persen;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

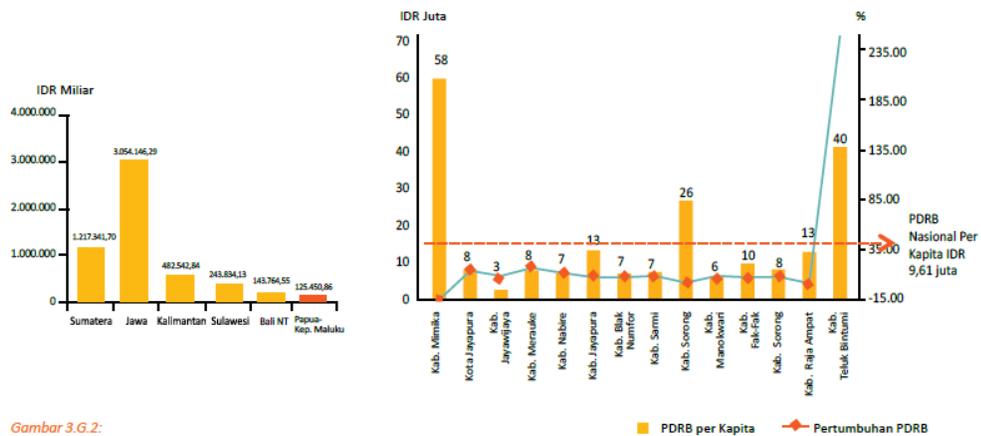
- 239 -

Gambar 3.G.1:
Perbandingan PDRB antar Koridor Ekonomi



b. Disparitas yang besar yang terjadi di antara Kabupaten di Papua. Sebagai contoh, PDRB per kapita Kabupaten Mimika adalah sebesar IDR 58 Juta, sementara kebanyakan kabupaten lainnya masih berada di bawah rata-rata PDB per kapita nasional (IDR 9,61 Juta);

Gambar 3.G.2:
Perbandingan PDRB antar Koridor Ekonomi



Gambar 3.G.2:

c. Investasi yang rendah di Papua disebabkan oleh tingginya risiko berusaha dan tingkat kepastian usaha yang rendah;
d. Produktivitas sektor pertanian belum optimal yang salah satunya disebabkan oleh keterbatasan sarana pengairan;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 240 -

- e. Keterbatasan infrastruktur untuk mendukung pembangunan ekonomi;
- f. Jumlah penduduk yang sangat rendah dengan mobilitas tinggi memberikan tantangan khusus dalam pembuatan program pembangunan di Papua. Kepadatan populasi Papua adalah 12,6 jiwa/km², jauh lebih rendah dari rata-rata kepadatan populasi nasional (124 jiwa/km²). Strategi pembangunan ekonomi Koridor Ekonomi Papua dan Kepulauan Maluku difokuskan pada 5 kegiatan Ekonomi Utama, yaitu Pertanian Pangan - MIFEE (*Merauke Integrated Food & Energy Estate*), Tembaga, Nikel, Migas, dan Perikanan.

Daya Dukung Wilayah

Air. Koridor Ekonomi Papua dan Kepulauan Maluku memiliki curah hujan yang tinggi sepanjang tahun dibandingkan koridor lainnya. Bila dilihat jumlah ketersediaan airnya, koridor ini memiliki kapasitas air terbesar yaitu mencapai 53 persen dari total ketersediaan air di Indonesia. (Kementerian Lingkungan Hidup, 2011).

Energi. Total cadangan minyak di Koridor Ekonomi Papua dan Kepulauan Maluku ialah 103,65 MMSTB atau 1,3 persen dari total cadangan nasional. Persebaran cadangan minyak tersebut yaitu 37,92 MMSTB di Maluku dan 65,73 MMSTB di Papua. Cadangan gas di Koridor Ekonomi Papua dan Kepulauan Maluku sebesar 39,13 TSCF yang terdiri dari 15,22 TSCF di Maluku dan 23,91 TSCF di Papua. Cadangan batubara yang terdapat di koridor ini yaitu 131 juta ton. Selain itu potensi sumber energi geothermal yang terdapat di Koridor Ekonomi Papua dan Kepulauan Maluku sebesar 1.029 MW dan sebagian besar potensi tersebut terdapat di Maluku. (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2012).

Kesehatan. Angka harapan hidup di Koridor Ekonomi Papua dan Kepulauan Maluku berada dibawah rata-rata nasional yaitu 67,6 tahun. Selain itu, kasus TBC banyak ditemukan di koridor ini terutama di Provinsi Papua. (Kementerian Kesehatan, 2011).

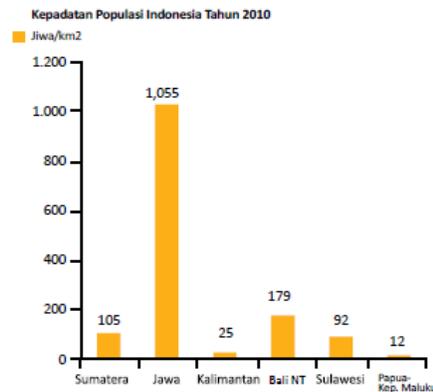
Lahan. Koridor Ekonomi Papua dan Kepulauan Maluku memiliki kawasan hutan terluas yaitu 41 persen hutan di Indonesia. Sebesar 77,8 persen dari total luas wilayah Papua dan 68,2 persen dari total luas wilayah Kepulauan Maluku merupakan kawasan hutan (Kementerian Kehutanan, 2011). Selain itu, Papua dianggap sebagai salah satu wilayah di dunia yang memiliki tutupan hutan hujan tropis yang masih utuh selain Amazon di Brasil dan Kongo di Afrika. Hal itu menjadikan Papua memiliki ekosistem terlengkap dan merupakan salah satu wilayah *mega diversity* yang ada di Indonesia.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 241 -

Gambar 3.G.3:
Kepadatan Populasi antar Pulau di Indonesia



Gambar 3.G.3:
Kepadatan Populasi antar Pulau di Indonesia Sumber: Badan Pusat Statistik

a. Pertanian Pangan - (MIFEE)

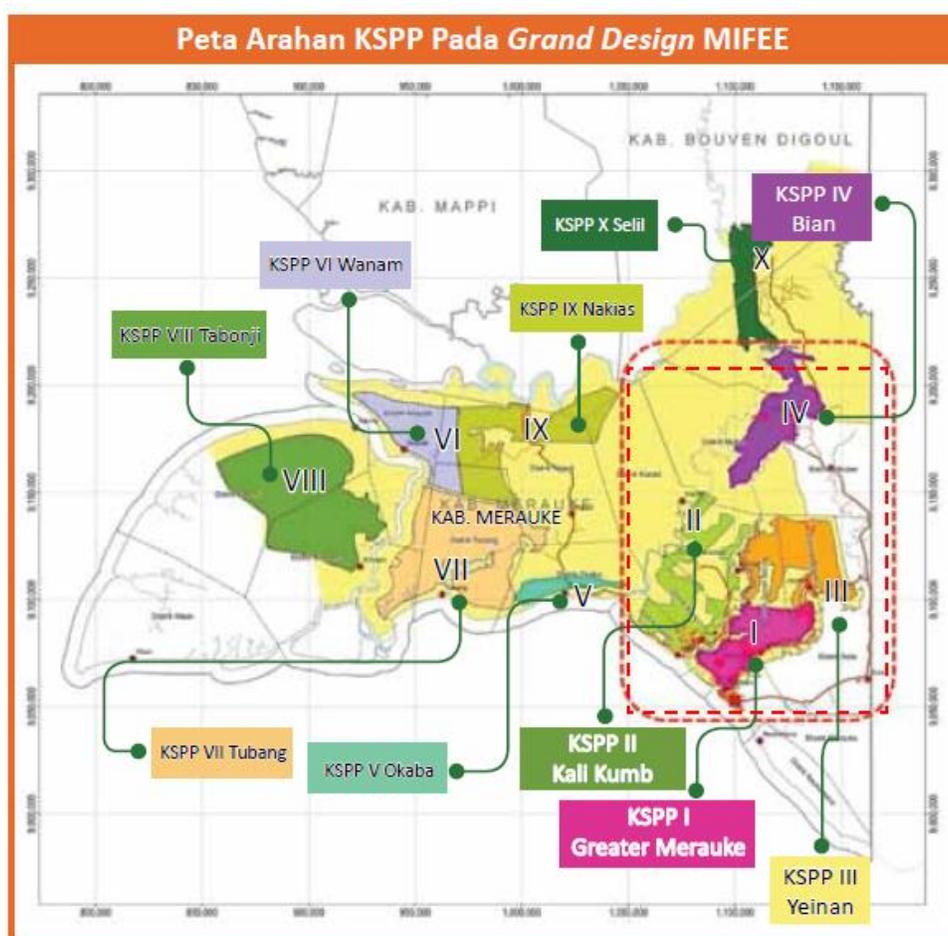
Dalam rangka mengantisipasi krisis pangan dan energi, maka Kawasan Merauke telah ditetapkan sebagai lumbung pangan dan energi di Kawasan Timur Indonesia dengan pertimbangan kawasan ini memiliki potensi lahan datar dan subur. Kegiatan tersebut diwujudkan dalam bentuk pengembangan MIFEE (*Merauke Integrated Food & Energy Estate*). MIFEE merupakan kegiatan usaha budidaya tanaman skala luas yang dilakukan dengan konsep pertanian sebagai sistem industrial yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), modal, serta organisasi dan manajemen modern.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 242 -

Gambar 3.G.4:
Peta Area MIFEE di Papua



Sumber: *Grand Design MIFEE*, Kementerian Pertanian, 2010

Pengembangan MIFEE dialokasikan seluas ± 500.000 Ha yang terdiri dari 10 Klaster Sentra Produksi Pertanian (KSPP). Lokasi sebaran KSPP tersebut dapat dilihat pada Gambar 3.G.4. Sebagai prioritas pengembangan MIFEE jangka pendek (2011 – 2014) maka dikembangkan Klaster I sampai IV, seluas 228.023 Ha. Empat Klaster Sentra Produksi Pertanian yang dikembangkan yaitu: Greater Merauke, Kali Kumb, Yeinan, dan Bian di Kabupaten Merauke. Untuk jangka menengah (kurun waktu 2015 – 2019) diarahkan pada terbangunnya kawasan sentra produksi pertanian tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perkebunan, serta perikanan darat di Klaster Okaba, Ilwayab, Tubang, dan Tabonji. Untuk jangka panjang (kurun waktu 2020 – 2030) diarahkan terbangunnya kawasan sentra produksi pertanian tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perkebunan serta perikanan di Klaster Nakias dan Selil.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 243 -

Dengan memperhatikan daya dukung lingkungan, rencana pengembangan MIFEE diarahkan untuk pembangunan kawasan lahan pertanian, kawasan pemukiman, kawasan pengolahan dan industri serta kawasan pusat prasarana dan pelayanan umum. Pada tahap pertama MIFEE akan dikembangkan di KSPP I-IV menggunakan lahan berstatus hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) dan Area Penggunaan Lain (APL). Dengan lahan seluas itu serta didukung oleh kebijakan pemerintah daerah, peluang investasi pengembangan MIFEE masih terbuka luas bagi investor baik dalam negeri ataupun luar negeri. Tanaman pangan yang akan ditanam di Kawasan MIFEE antara lain padi, jagung, kedelai, sorgum, gandum, sayur dan buah-buahan. Tanaman non-pangan yang akan ditanam di Kawasan MIFEE seperti tebu, karet, dan kelapa sawit serta peternakan seperti ayam, sapi, kambing, dan kelinci.

Untuk mendukung peningkatan ketahanan pangan, dan juga sebagai lumbung pangan di Kawasan Timur Indonesia, maka produksi padi menjadi salah satu aktivitas primer di MIFEE. Jika kita melihat pada tabel dibawah, maka total produksi padi di Koridor Ekonomi Papua dan Kepulauan Maluku pada tahun 2012 memiliki tingkat produksi paling kecil yaitu hanya sebesar 318.234 Ton dengan luas panen tanaman padi sebesar 83.182 Ha. Kedepannya, dengan pengembangan produksi tanaman padi di Kawasan MIFEE diharapkan dapat memenuhi kebutuhan produksi tanaman padi bukan hanya di Koridor Ekonomi Papua dan Kepulauan Maluku tetapi juga kebutuhan wilayah lain.

Tabel 3. G. 1:

Tabel Luas Panen – Produksi Tanaman Padi Seluruh
Koridor Ekonomi Tahun 2012

Koridor Ekonomi	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)
Sumatera	3.487.196	16.004.837
Jawa	6.185.521	36.526.663
Bali NT	774.542	3.678.350
Kalimantan	1.316.356	4.695.268
Sulawesi	1.596.646	7.821.789
Papua dan Kep. Maluku	83.182	318.234



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 244 -

Sementara itu, salah satu tanaman non-pangan lainnya yang akan dikembangkan di MIFEE adalah kelapa sawit. Industri kelapa sawit menghasilkan devisa negara terbesar diluar minyak dan gas bumi. Indonesia merupakan penghasil kelapa sawit terbesar di dunia, yaitu menghasilkan 43 persen dari total produksi minyak mentah sawit (*Crude Palm Oil/CPO*) dunia. Sepanjang tahun 2009 sampai dengan tahun 2012, pertumbuhan produksi minyak kelapa sawit di Indonesia melampaui Malaysia yaitu sebesar 27,27 persen, sedangkan Malaysia pertumbuhan produksi minyak kelapa sawit sepanjang tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 hanya sebesar 4,15 persen. Pada kuartal keempat tahun 2010, ekspor kelapa sawit Indonesia mencapai US \$ 5,1 Miliar, tumbuh sebesar 41,3 persen dari kuartal sebelumnya. Pertumbuhan ekspor yang tinggi ini ditopang oleh kenaikan harga minyak kelapa sawit sebesar 23 persen dari kuartal sebelumnya, dan kenaikan volume ekspor sebesar 14,8 persen dari kuartal sebelumnya.

Meskipun tidak begitu luas di dibandingkan wilayah lain di Indonesia, Papua memiliki lahan yang dapat dipergunakan untuk perkebunan kelapa sawit, seperti dapat dilihat pada Gambar di bawah ini.

Gambar 3.G.5:

Produksi dan Pertumbuhan Produksi Minyak Mentah Sawit Indonesia dan Malaysia (Ribu Ton)

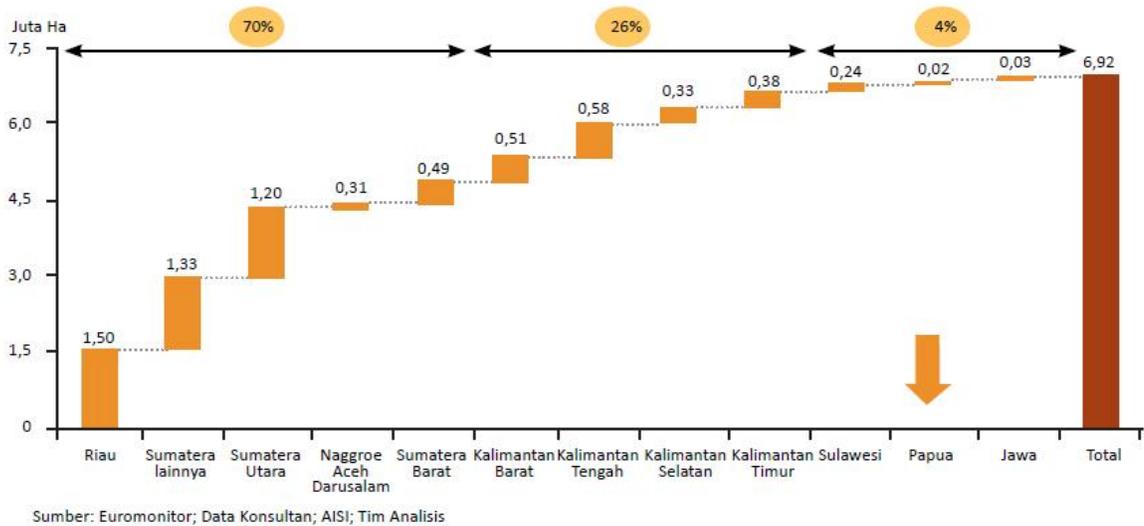




PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

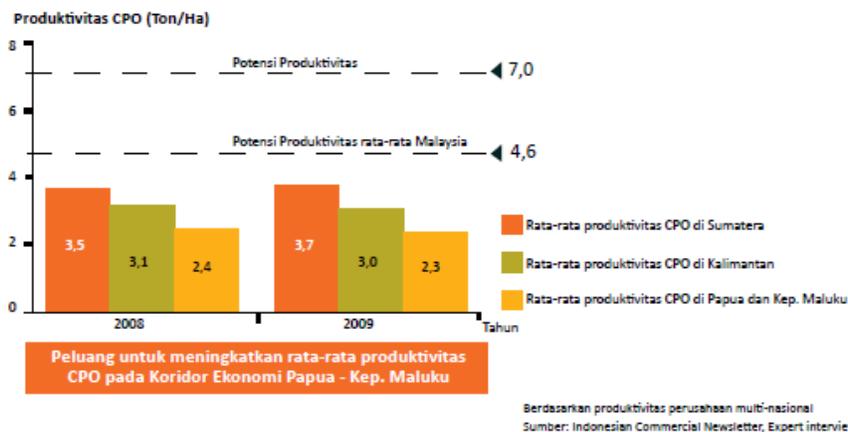
- 245 -

Gambar 3.G.6:
Area untuk Perkebunan Kelapa Sawit di Indonesia tahun 2009



Apabila dibandingkan dengan Sumatera dan Kalimantan, kelapa sawit di Papua memiliki produktivitas yang lebih rendah. Hal ini disebabkan oleh penggunaan bibit yang berkualitas rendah, penggunaan pupuk yang tidak memadai, kurangnya fasilitas penggilingan, serta waktu tempuh yang panjang dari perkebunan hingga tempat penggilingan

Gambar 3.G.7:
Produktivitas CPO di Koridor Ekonomi Papua dan Kepulauan Maluku





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 246 -

1) Regulasi dan Kebijakan

Untuk melaksanakan pengembangan MIFEE tersebut, ada beberapa hal terkait regulasi yang harus dilakukan, antara lain:

- a) Pengembangan lahan *food estate* secara bertahap;
- b) Percepatan proses pelepasan kawasan hutan untuk *food estate*;
- c) Sosialisasi pada masyarakat setempat tentang pelaksanaan dan manfaat program MIFEE bagi kesejahteraan masyarakat;
- d) Pemetaan tanah ulayat untuk mendukung perizinan penggunaan lahan pengembangan MIFEE.

2) Konektivitas (Infrastruktur)

Pengembangan MIFEE juga memerlukan dukungan infrastruktur yang meliputi:

- a) Penyiapan rencana pemeliharaan dan pengembangan jaringan prasarana sumber daya air dan reklamasi rawa;
- b) Pengembangan pusat pelayanan dan pusat koleksi-distribusi produksi pertanian;
- c) Pelabuhan laut di Merauke dan dermaga-dermaga di sepanjang Sungai Kalimaro, Sungai Bian;
- d) Konektivitas darat yang menghubungkan kebun kelapa sawit dengan lokasi penggilingan dan pelabuhan;
- e) Peningkatan dan pengembangan jalan & jembatan di masing-masing Klaster Sentra Produksi Pertanian (KSPP);
- f) Rehabilitasi dan Pembangunan Jaringan Tata Air di masing-masing KSPP;
- g) Pembangunan Terminal Agribisnis, Pergudangan dan Pelabuhan Ekspor di Serapuh & Wogikel;
- h) Lanjutan Pembangunan Pelabuhan Samudera Perikanan Merauke dan Pelabuhan Merauke;
- i) Pembangunan Pabrik Pupuk Organik di Wasur, Serapuh, Tanah Miring SP VII, Wapeko, Onggaya, Sota dan Proyek Amoniak Urea di Tangguh;
- j) Pembangunan PLT Biomasa di Merauke & Tanah Miring;
- k) Pembangunan Rumah Potong Hewan (RPH) untuk mendukung pengembangan usaha pengolahan hasil ternak.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 247 -

3) SDM dan IPTEK

Selain kebutuhan perbaikan regulasi dan dukungan infrastruktur, pengembangan MIFEE juga memerlukan dukungan terkait pengembangan SDM dan IPTEK, yaitu:

- a) Penyiapan sumber daya manusia berkualitas melalui pelatihan tenaga kerja dan peningkatan kapasitas perguruan tinggi;
- b) Penguatan dan pemberian bantuan pada SMK pertanian untuk mendorong peningkatan kemampuan SDM di bidang pertanian pangan;
- c) Penyediaan bantuan modal bagi kelompok tani dan teknologi budidaya pertanian berbasis IPTEK;
- d) Pembangunan balai penelitian & pengembangan teknologi pertanian, peternakan, perikanan di Merauke, serta pengadaan peralatan alat dan mesin pertanian (traktor, *planter*, *reaper*, *power thresher*, *mini combine*, pompa air);
- e) Penyiapan teknologi budidaya pertanian, perkebunan dan peternakan berbasis IPTEK (pra dan pasca panen) di Merauke.

b. Tembaga

Bangsa Indonesia seharusnya bersyukur karena memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah. Salah satunya adalah tembaga. Cadangan tembaga terbesar di Indonesia berada di wilayah Papua dan sebanyak 45 persen cadangan tembaga nasional berada di wilayah Papua. Dalam skala global, Indonesia menempati peringkat ke-7 untuk cadangan tembaga dunia dengan nilai sekitar 4,1 persen, dan peringkat ke-2 dari sisi produksi tembaga dunia dengan nilai sebesar 10,4 persen. Secara umum, berikut adalah gambaran rantai nilai dari Kegiatan Ekonomi Utama Tembaga:



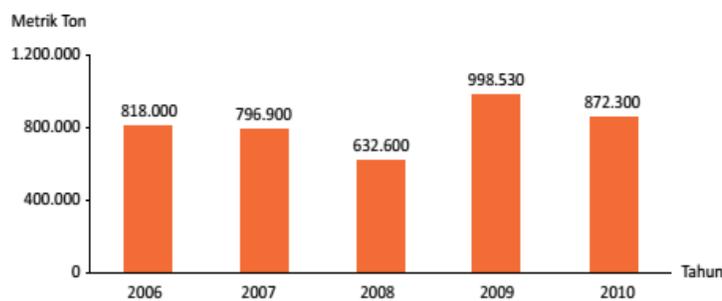
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 248 -

Gambar 3.G.8:
Rantai Nilai Kegiatan Pertambangan Tembaga



Gambar 3.G.9:
Produksi Tembaga Indonesia Tahun 2006-2010



Sumber: index mundi, 2010

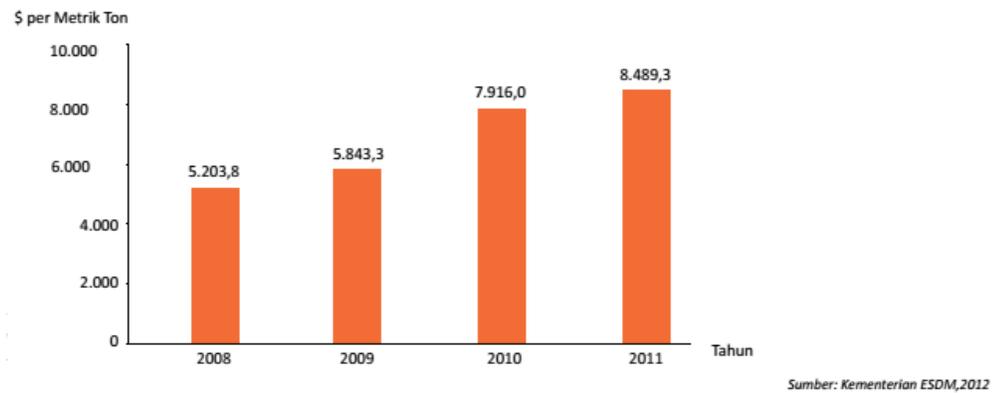
Secara umum, produksi tembaga Indonesia dari tahun 2006 – 2010 mengalami kondisi fluktuatif. Produksi tembaga paling rendah terjadi pada tahun 2008, dimana total produksi saat itu adalah sebesar 632.600 Metrik Ton. Hal ini dikarenakan krisis keuangan yang terjadi pada tahun 2008, turut mempengaruhi jumlah produksi tembaga Indonesia. Kemudian setelah periode krisis, produksi tembaga Indonesia meningkat pada tahun 2009 dimana jumlahnya produksinya meningkat menjadi 998.530 Metrik Ton. Dan sampai dengan data terakhir tahun 2010, tercatat jumlah produksi tembaga Indonesia pada tahun 2010 turun menjadi 872.300 Metrik Ton



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 249 -

Gambar 3.G.10:
Harga Tembaga Dunia Tahun 2008-2011



Harga tembaga dunia pada tahun 2010 mencapai USD 7.916 per Metrik Ton dan nilai tersebut terus naik dari tahun sebelumnya yaitu sebesar USD 5.843,3 per Metrik Ton. Dengan potensi cadangan yang masih sangat tinggi dan juga harga tembaga yang terus menerus mengalami kenaikan, maka kesempatan untuk berinvestasi di sektor tembaga masih sangat besar.

Khusus untuk produksi tembaga di Papua, terjadinya kondisi stagnasi produksi tembaga lebih disebabkan oleh beberapa masalah di bidang tenaga kerja dan juga terjadinya bencana alam di lokasi pertambangan. Eksplorasi dan pengolahan tembaga di Indonesia saat ini sebagian besar terpusat di Timika (Kabupaten Mimika). Namun, eksplorasi yang memerlukan biaya tinggi dan seringnya terjadi tanah longsor menyebabkan potensi lokasi penambangan lainnya belum dapat dikembangkan. Selain itu, risiko ketidakpastian peraturan menghambat pengembangan industri tembaga di Papua. Hal yang harus diperhatikan untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah adalah dengan memanfaatkan rantai nilai di peleburan dan pemurnian, memperbaiki peraturan dan perencanaan, mendorong kesinambungan serta membangun kawasan industri pengolahan tembaga.

Sampai saat ini pemerintah telah merencanakan membangun smelter untuk meningkatkan produksi tembaga. Ada beberapa smelter yang akan beroperasi di Indonesia, antara lain: smelter di Maros Sulawesi Selatan pada tahun 2013, smelter di Bontang dan smelter Timika pada tahun 2014. Dengan beroperasinya smelter-smelter baru di Indonesia, diharapkan terjadi peningkatan surplus produksi tembaga, sehingga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan industri dalam dan luar negeri.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 250 -

1) Regulasi dan Kebijakan

Untuk melaksanakan strategi pengembangan Kegiatan Ekonomi Utama Tembaga, ada beberapa hal terkait regulasi dan kebijakan yang harus dilakukan, yaitu:

- a) Mendorong realisasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, dengan membangun Kawasan Industri Tembaga di Timika sebagai lokasi industri pengolahan dan pemurnian konsentrat tembaga dan industri-industri hilir lainnya (anoda, katoda, slab, billet, powder, wire, wire rod, cable);
- b) Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2008 tentang Pengembangan Pertambangan, untuk mendorong terciptanya iklim investasi yang baik, mendorong peningkatan usaha eksplorasi, dan menjamin pelestarian lingkungan hidup di kawasan pertambangan;
- c) Pemantapan alokasi ruang kawasan pertambangan pada dokumen RTRW Kabupaten/Provinsi di Papua.

2) Konektivitas (Infrastruktur)

Pengembangan Kegiatan Ekonomi Utama Tembaga juga memerlukan dukungan infrastruktur yang meliputi:

- a) Pembangunan pembangkit listrik non-diesel serta pembuatan energi bersih off-grid untuk daerah eksplorasi yang jauh dan tersebar;
- b) Peningkatan fasilitas pelabuhan seperti fasilitas pemrosesan kargo serta peningkatan konektivitas ke Bandar Udara Jayapura;
- c) Peningkatan kapasitas kargo Pelabuhan Laut Timika;
- d) Peningkatan infrastruktur bagi penambangan bawah tanah pada Kontrak Karya Area Blok A di Mimika;
- e) Pembangunan jalan akses dari Kawasan Industri Tembaga ke Pelabuhan Timika;
- f) Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Urumuka;
- g) Pembangunan instalasi pengolahan limbah, air bersih, sarana jalan, drainase dan penghijauan di kawasan industri dan sekitarnya;
- h) Pembangunan instalasi jaringan sistem informasi dan telekomunikasi di Kawasan Industri Tembaga Timika.

3) SDM dan IPTEK

Selain kebutuhan perbaikan regulasi dan dukungan infrastruktur, pengembangan Kegiatan Ekonomi Utama Tembaga juga perlu dukungan terkait pengembangan IPTEK dan sumber daya manusia, yaitu:



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 251 -

- a) Pembentukan Pusat Disain & Rekayasa Teknologi Tembaga yang dapat memfasilitasi bantuan peralatan teknologi tembaga di Timika;
- b) Penyiapan SDM di bidang industri tembaga melalui Pendidikan, Pelatihan dan Sertifikasi Keahlian dipusatkan di Timika, seperti pembangunan Akademi Komunitas bidang Tembaga di Mimika, penguatan sekolah-sekolah pertambangan yang telah ada dan pelatihan pengetahuan cara peningkatan nilai tambah bijih tembaga;
- c) Dalam meningkatkan peran pengawasan negara terhadap usaha pertambangan di koridor ini, dibuat pelatihan praktek pelaksana inspeksi tambang dan evaluasi laporan eksplorasi pertambangan yang diprakarsai oleh Kementerian ESDM;
- d) Pelatihan terkait pengenalan tambang bawah tanah, pengolahan tembaga, pengolahan dan pemurnian emas sebagai produk bawaan;
- e) Pengembangan program padat karya produktif, padat karya infrastruktur, tenaga kerja mandiri dan teknologi tepat guna dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk sektor pertambangan khususnya tembaga.

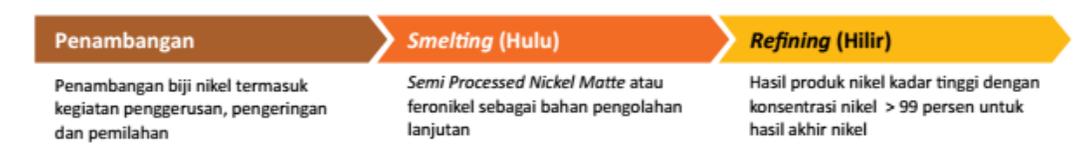
c. Nikel

Pada tahun 2010, produksi nikel Indonesia mencapai 235,8 Ribu Ton, menjadikan Indonesia sebagai produsen nikel dunia terbesar ke-2 di dunia. Produksi tersebut meningkat dari tahun sebelumnya yang berjumlah 202,8 Ribu Ton atau naik sebesar 16,27 persen. Jumlah produksi tersebut diperkirakan akan terus meningkat dikarenakan potensi cadangan nikel Indonesia berada pada peringkat ke-8 dunia atau sekitar 2,9 persen dari cadangan dunia. Oleh karena itu, industri pengolahan nikel sangat layak untuk dipercepat dan diperluas pembangunannya.

Ketika terjadi krisis keuangan pada tahun 2008, harga nikel dunia mengalami penurunan dikarenakan jumlah produksi nikel turun dan permintaan akan nikel juga ikut turun. Hal ini membuat harga nikel dunia turun mencapai titik terendah pada bulan September 2008, yakni USD 4.900 per Ton.

Gambar 3.G.11:

Rantai Nilai Pertambangan Nikel

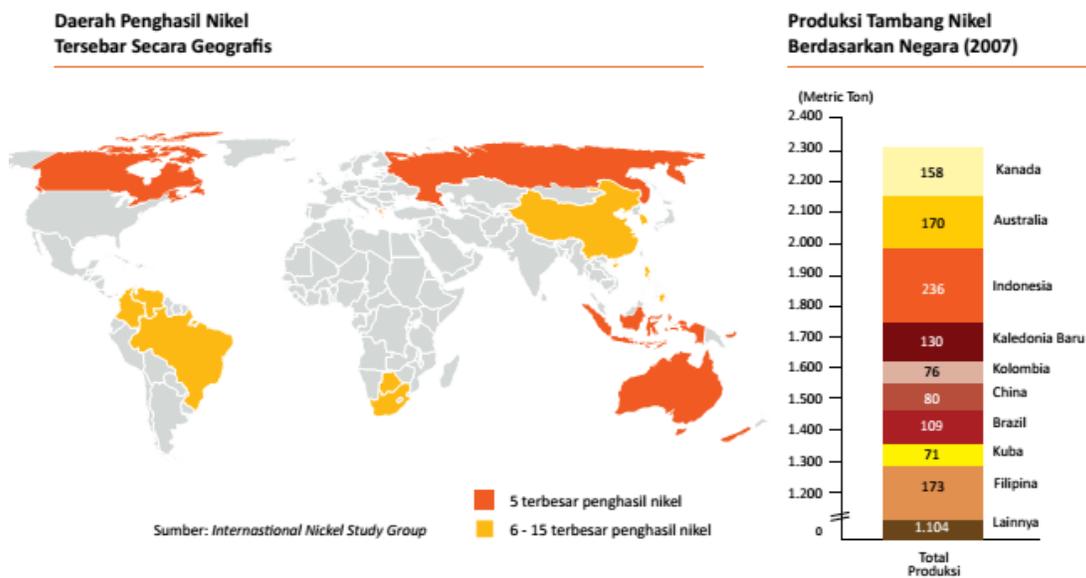




PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 252 -

Gambar 3.G.12:
Sumber Nikel Dunia



Di Koridor Ekonomi Papua dan Kepulauan Maluku, potensi nikel terdapat di Pulau Halmahera, Maluku Utara. Tantangan terbesar dalam percepatan dan perluasan kegiatan pertambangan nikel adalah menciptakan industri hilir dari pertambangan nikel khususnya dalam pemurnian (refining) hasil produksi nikel. Indonesia belum memiliki fasilitas pemurnian nikel padahal kegiatan pemurnian memberikan nilai tambah yang sangat tinggi.

Sebelum dikeluarkannya Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2011 tentang Larangan Mengekspor Barang Mentah, lebih dari 50 persen nikel yang diekspor dalam bentuk ore. Namun, sejak dikeluarkannya Peraturan Menteri ESDM tersebut, maka tidak boleh ada lagi ekspor nikel dalam bentuk ore, melainkan harus diolah terlebih dahulu menjadi barang setengah jadi. Dari 235 juta ton nikel yang diproduksi Indonesia pada tahun 2010, hanya 77 ribu ton yang di ekspor dalam bentuk matte. Oleh karena itu pemerintah mengupayakan sebuah langkah dengan menerbitkan Peraturan Menteri ESDM agar pertambangan dari nikel tidak hanya mengekspor dalam bentuk bijih, tetapi juga dalam bentuk produk yang memiliki nilai tambah lebih tinggi.

Kendala lain dalam pertambangan nikel adalah terhambatnya peningkatan tahap kegiatan eksplorasi menjadi tahap operasi dan produksi atau pembukaan area baru karena lambatnya penerbitan Izin Usaha Pertambangan, yang biasanya terkait dengan lambatnya pengurusan Izin Pinjam Pakai Lahan Hutan atau lambatnya penerbitan rekomendasi dari Pemerintah Daerah.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 253 -

Beberapa tantangan investasi di pertambangan nikel, adalah masalah regulasi yang belum konsisten antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan antara kementerian satu dan lainnya. Selain itu, investor juga masih menghadapi masalah perizinan pertambangan nikel. Di lain pihak, pertambangan nikel juga menimbulkan beberapa masalah lingkungan, seperti polusi udara, penurunan kualitas tanah, sengketa tanah, dan gangguan ekosistem, disamping tantangan sosial berupa banyaknya imigran dari luar kawasan. Oleh karena itu, strategi utama pengembangan industri nikel adalah meningkatkan kegiatan investasi pertambangan nikel yang memenuhi aspek lingkungan dan aspek sosial.

1) Regulasi dan Kebijakan

Untuk melaksanakan strategi pengembangan nikel, ada beberapa hal terkait regulasi dan kebijakan yang harus dilakukan, antara lain:

- a) Penyederhanaan peraturan dan birokrasi (antar lembaga dan kementerian) untuk mempermudah kegiatan memulai dan mengoperasikan pertambangan;
- b) Perbaikan peraturan terkait pertanahan yang koheren;
- c) Perbaikan kelembagaan untuk membuat investasi di pertambangan nikel lebih menarik (pada saat ini terdapat inefisiensi seperti akuisisi tambang, pembuatan kontrak, dan sebagainya);
- d) Peningkatan koordinasi berbagai kementerian. Contohnya adalah perlu adanya koordinasi antara kementerian yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral dan kementerian yang membidangi urusan kehutanan mengenai izin melakukan pertambangan termasuk di daerah tertinggal;
- e) Perbaikan aturan penggunaan lahan dan peraturan yang lain dalam pemberian izin pertambangan kepada perusahaan;
- f) Penguatan industri hilir nikel dengan diupayakan adanya fasilitasi kemitraan dan sinergi yang kuat antara industri ferro nikel dengan industri hulu dan hilirnya;
- g) Dukungan Pemerintah berupa pemberian insentif investasi kepada investor.

2) Konektivitas (Infrastruktur)

Pengembangan Kegiatan Ekonomi Utama Nikel juga memerlukan dukungan infrastruktur yang meliputi:

- a) Pembangkit listrik (ketersediaan energi);
- b) Akses jalan antara tambang dan fasilitas peleburan dan pemurnian;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 254 -

- c) Infrastruktur pelabuhan laut yang dapat melayani pengiriman peralatan dan bahan dari daerah lain.

3) SDM dan Iptek

Pengembangan Kegiatan Ekonomi Utama Nikel juga memerlukan dukungan dari sisi SDM dan Iptek melalui:

- a) Pembentukan konsorsium antar lembaga sebagai sarana pengembangan teknologi pengolahan komoditas tambang mineral termasuk nikel, program ini dapat diselenggarakan melalui insentif Peningkatan Kemampuan Peneliti dan Perekayasa (PKPP);
- b) Pelatihan peningkatan nilai tambah bijih nikel sebagai upaya dalam mencapai standar batasan minimum pengolahan dan/atau pemurnian komoditas tambang mineral termasuk sisa dan produk sampingan;
- c) Penyelenggaraan program pelatihan dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi berupa program padat karya produktif, padat karya infrastruktur, tenaga kerja mandiri dan teknologi tepat guna untuk komoditas tambang mineral nikel di Koridor Ekonomi Papua dan Kepulauan Maluku

d. Minyak dan Gas Bumi

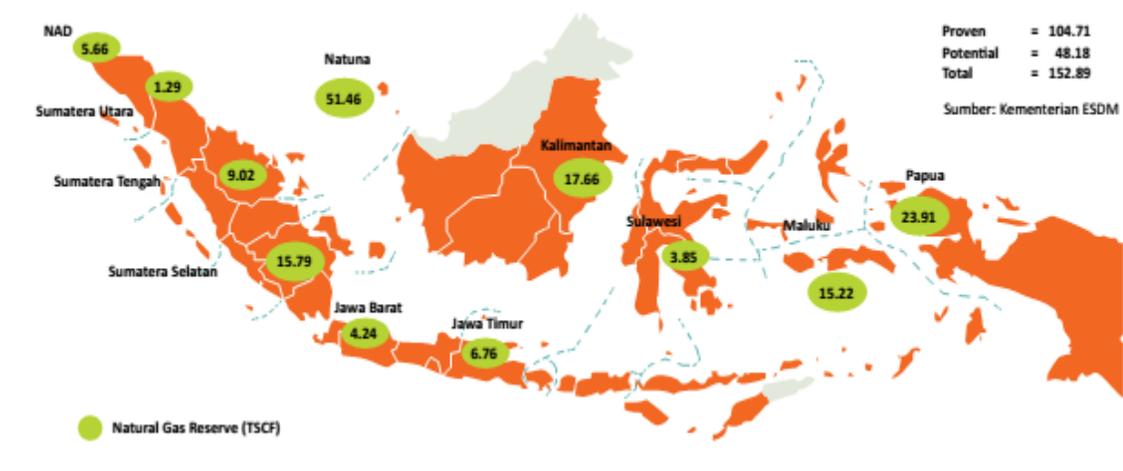
Sektor minyak dan gas, merupakan penyumbang terbesar bagi perekonomian Indonesia. Pada tahun 2010, sektor energi dan sumber daya mineral menyumbang IDR 210 Triliun pada penerimaan negara. Jumlah tersebut akan terus bertambah seiring dengan masih banyaknya potensi minyak dan gas di berbagai daerah lain di Indonesia seperti yang terlihat pada gambar dibawah ini.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 255 -

Gambar 3.G.13:
Peta Persebaran Cadangan Gas di Indonesia



Pemerintah Indonesia telah menentukan target pertumbuhan yang tinggi, yang membutuhkan energi dan investasi untuk merealisasikannya. Untuk itu, dibutuhkan investasi yang besar untuk merealisasikan potensi geologis seiring dengan pergerakan industri minyak dan gas ke wilayah yang memiliki tantangan yang lebih besar.

Hasil produksi minyak dan gas bumi dapat dikatakan separuh dari produksi energi fosil di Indonesia, disamping batu bara. Produksi minyak bumi sejak tahun 2007 secara rata-rata terus mengalami penurunan. Pada tahun 2011 merupakan produksi terendah minyak bumi Indonesia yaitu sebesar 289.899 Barel. Rendahnya produksi minyak bumi di Indonesia salah satunya disebabkan kurangnya jumlah kilang penampungan minyak.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 256 -

Gambar 3.G.14: Data Produksi Minyak Bumi Indonesia



Gambar G.15: Data Produksi Gas Alam



Kondisi sebaliknya, untuk produksi gas alam Indonesia sejak tahun 2007 hingga tahun 2011 secara rata - rata terus mengalami kenaikan. Sepanjang tahun 2007 – 2011, gas alam Indonesia mengalami kenaikan sebesar 450.839 MMscf. Jumlah tersebut diperkirakan akan terus meningkat mengingat potensi gas alam Indonesia masih memiliki potensi cadangan terbesar.

Migas memiliki potensi yang sangat besar untuk dapat dikembangkan menjadi pilar yang kuat dalam pertumbuhan Koridor Ekonomi Papua dan Kepulauan Maluku. Papua memiliki cadangan migas yang besar, minyak bumi di sekitar Sorong, Blok Pantai Barat Sarmi, Semai dan gas bumi di sekitar Teluk Bintuni. Upaya mengoptimalkan produksi migas tersebut, dapat dilakukan dengan menyeimbangkan kapasitas ekspor dan impor migas, menyediakan iklim investasi yang positif, menyempurnakan beberapa perundang-undangan dan perizinan di sektor migas, serta mendorong pencapaian target liftingminyak bumi yang pada akhirnya berdampak pada harga minyak bumi.

Potensi migas di Teluk Bintuni sudah dilirik investor asing untuk dikembangkan (ekspansi) rencana pembangunan train3 dan 4 dalam jangka waktu dekat, dan pembangunan train hingga ke-8 dalam jangka waktu panjang. Di tingkat global, Indonesia memiliki potensi minyak dan gas yang besar, yaitu;

- Peringkat 25 sebagai negara dengan potensi minyak terbesar yaitu sebesar 4,3 miliar barel;
- Peringkat 21 penghasil minyak mentah terbesar dunia sebesar 1 juta barel/hari;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 257 -

- c) Peringkat 13 negara dengan cadangan gas alam terbesar sebesar 92,9 trillion cubic feet;
- d) Peringkat ke-8 penghasil gas alam terbesar dunia sebesar 7,2 trillion cubic feet;
- e) Peringkat ke-2 negara pengeksport LNG terbesar sebesar 29,6 billion cubic feet.

1) Regulasi dan Kebijakan

Untuk melaksanakan strategi pengembangan migas, ada beberapa hal terkait regulasi dan kebijakan yang harus dilakukan, antara lain:

- a) Meningkatkan cadangan produksi melalui peningkatan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi;
- b) Meningkatkan kemudahan investor dalam menjalankan kegiatan usahanya;
- c) Meningkatkan ketersediaan informasi yang berkaitan dengan ketersediaan gas bumi;
- d) Meningkatkan sinergi pemerintah dengan stakeholder terkait;
- e) Penerapan single window atau one-stop-service dalam pengurusan izin area eksplorasi dan produksi, sehingga permasalahan lintas sektor (tumpang tindih lahan dan dampak lingkungan) dapat diselesaikan secara cepat dan terpadu;
- f) Menciptakan penawaran *Production Sharing Contract* (PSC) yang lebih menarik terutama untuk area yang sulit untuk dilakukan kegiatan eksplorasi (dengan cara menghilangkan capping dalam *cost recovery* dan menaikkan batas *cost recovery*);
- g) Menyusun kesepakatan dan kontrak bagi hasil usaha migas bagi Pemerintah Daerah.

2) Konektivitas (Infrastruktur)

Pengembangan Kegiatan Ekonomi Utama Migas juga memerlukan dukungan infrastruktur yang meliputi:

- a) Meningkatkan pengembangan infrastruktur gas bumi;
- b) Pembangunan jaringan pipa transmisi di kawasan Teluk Bintuni;
- c) Pembangunan jaringan distribusi di kawasan Teluk Bintuni;
- d) Pembangunan depot pengisian pesawat udara di Sorong;
- e) Pembangunan jaringan gas kota di Sorong;
- f) Pembangunan Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) dan Stasiun Pengangkutan dan Penyimpanan Bulk Elpiji (SPPBE) di beberapa kabupaten yang terkonversi minyak tanah ke elpiji.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 258 -

3) SDM dan IPTEK

Selain kebutuhan perbaikan regulasi dan dukungan infrastruktur, pengembangan Kegiatan Ekonomi Utama Migas juga perlu dukungan terkait pengembangan SDM dan IPTEK yang dapat berupa:

- a) Pendirian Pusat Informasi Migas di Sorong;
- b) Pembinaan dan pengelolaan kegiatan hulu migas dan pengembangan masyarakat yang berada di wilayah
- c) industri migas;
- d) Pendirian Litbang Migas di Sorong.

e. Perikanan

Indonesia memiliki kedudukan penting di sektor perikanan. Dengan luasnya wilayah perairan di Indonesia, maka Indonesia berpeluang untuk menjadi salah satu negara eksportir komoditas perikanan terbesar dunia. Saat ini pertumbuhan produksi makanan laut mencapai 7 persen per tahun. Kondisi ini menempatkan Indonesia sebagai salah satu produsen makanan laut terbesar di Asia Tenggara.

Sebagai contoh, untuk produksi ikan tuna, Indonesia menempati urutan ketiga sebagai negara penghasil tuna terbesar dunia. Hal ini sejalan dengan semakin bertambahnya produksi perikanan di Indonesia dari tahun ke tahun, yang masih didominasi perikanan tangkap. Periode 2009 – 2010, total produksi perikanan tangkap dan budidaya mengalami kenaikan dari 9,85 Juta Ton menjadi 11,60 Juta Ton. Jumlah ini akan terus meningkat, mengingat belum sepenuhnya potensi perikanan di Indonesia dikembangkan sepenuhnya.

Gambar 3.G.16:

Data Produksi Perikanan Indonesia



Sumber: Badan Pusat Statistik, data di olah

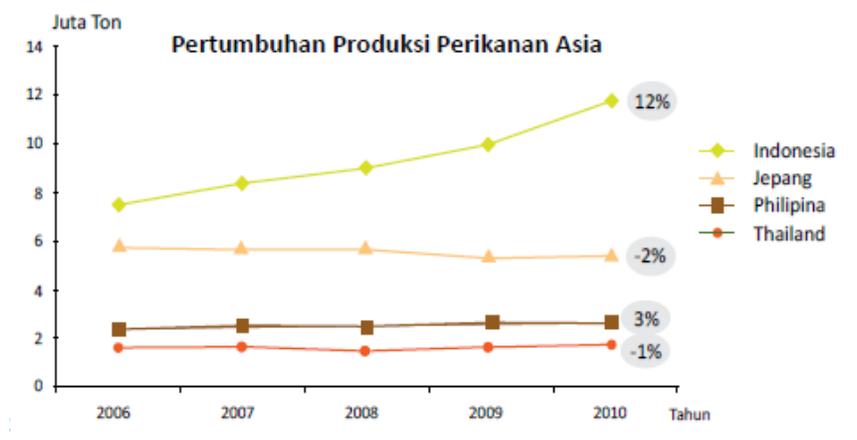


PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 259 -

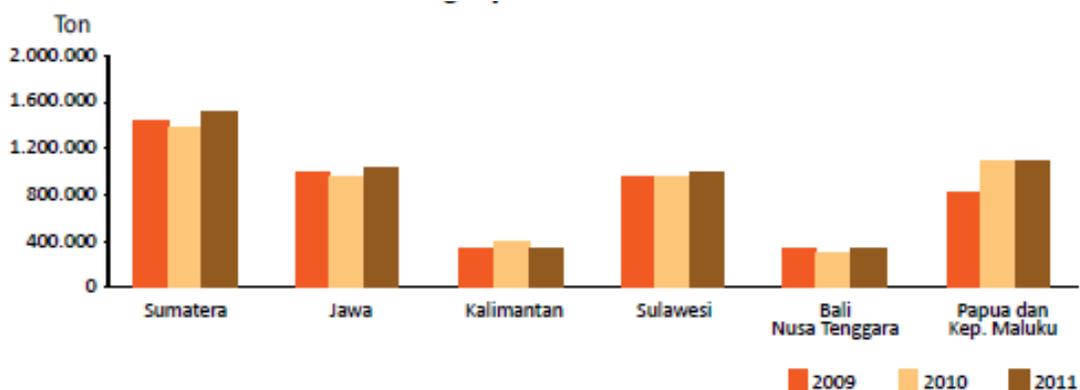
Walaupun peluang di sektor perikanan ini cukup besar, tetapi ada beberapa tantangan yang perlu disikapi untuk mencapai perkembangan sektor perikanan yang bisa meningkatkan kontribusi sektor perikanan pada PDRB Indonesia maupun daerah pada khususnya. Berdasarkan sebaran produksi perikanan di wilayah Indonesia, terlihat bahwa Koridor Ekonomi Papua dan Kepulauan Maluku merupakan wilayah yang memiliki produksi perikanan laut ke-2 terbesar di Indonesia setelah Koridor Ekonomi Sumatera.

Gambar 3.G.17:
Pertumbuhan Produksi Perikanan Asia



Gambar 3.G.18:

Volume Produksi Perikanan Tangkap Laut Indonesia Tahun 2008-2001





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 260 -

Pada saat ini, pertumbuhan produksi perikanan Indonesia di Asia lebih tinggi dibandingkan negara-negara tetangga lainnya, seperti yang terlihat pada grafik 3.G.17. Grafik tersebut menunjukkan pertumbuhan produksi perikanan beberapa negara di Asia termasuk Indonesia dari tahun 2006 – 2010. Jika dilihat pada grafik tersebut, pertumbuhan produksi perikanan Indonesia tertinggi yaitu sebesar 12 persen dibandingkan negara-negara lain seperti Jepang, Thailand, dan Filipina.

Kegiatan Ekonomi Utama Perikanan di Koridor Ekonomi Papua dan Kepulauan Maluku difokuskan di perairan Kepulauan Maluku karena potensinya yang sangat besar. Oleh karena itu, Maluku ditetapkan menjadi Kawasan Lumbung Ikan Nasional. Pengembangan perikanan di Maluku Utara akan dirintis dengan mengembangkan Mega Minapolitan Morotai sedangkan di Papua Barat dan Papua hanya terdapat kegiatan perikanan yang masih kecil sehingga pengembangannya perlu didorong sesuai dengan potensinya yang besar. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyebutkan bahwa potensi perikanan Maluku ada di Laut Banda, Laut Seram dan Laut Arafura. Ketiga lokasi potensial itu disebut golden fishing ground. Kementerian Kelautan dan Perikanan bekerja sama dengan investor swasta juga akan membuat simpul pengolahan industri perikanan di Maluku, yakni di Tual, Ambon dan Seram. Pembangunan budidaya perikanan Maluku mempunyai peluang yang sangat besar dilihat dari lingkungan strategis dan potensi sumberdaya yang tersedia, yakni berupa:

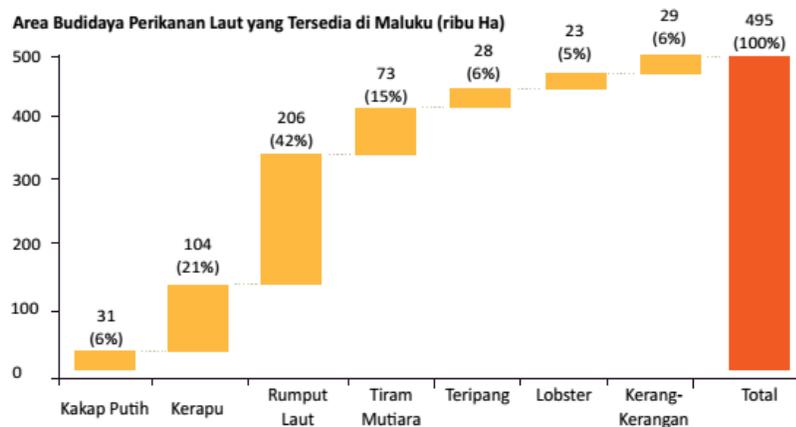
- Peningkatan jumlah penduduk dunia membutuhkan semakin banyak penyediaan ikan;
- Pergeseran pola konsumsi masyarakat dunia ke produk perikanan;
- Tuntutan penyediaan makanan bermutu tinggi dan memenuhi syarat kesehatan;
- Keunggulan komparatif terhadap pasar dunia karena letaknya yang relatif;
- Dekat dengan negara tujuan ekspor, seperti Jepang;
- Memiliki potensi sumber daya lahan yang sangat besar, akan tetapi belum dimanfaatkan dengan optimal;
- Rendahnya kualitas mutu produk olahan ikan sehingga sulit bersaing di pasar ekspor.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 261 -

Gambar 3.G.19:
Area Budidaya Perikanan Laut yang Tersedia di Maluku



Tantangan yang dihadapi dalam mengembangkan sektor perikanan di koridor ini adalah:

- Sulitnya mendapatkan modal usaha dari perbankan bagi usaha perikanan kecil;
- Belum termanfaatkannya potensi Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional (1,62 juta ton/tahun);
- Belum terpadunya kegiatan usaha penangkapan ikan, tambak ikan, budidaya rumput laut dan industri pengolahan;
- Masih kurangnya infrastruktur pelabuhan, power dan energi, serta bangunan yang dapat mendukung kegiatan perikanan;
- Teknologi penangkapan dan pengolahan hasil ikan belum memadai.

1) Regulasi dan Kebijakan

Untuk melaksanakan strategi pengembangan perikanan, terdapat beberapa hal terkait regulasi dan kebijakan yang harus dilakukan, antara lain:

- a) Deregulasi dalam bidang penyediaan kredit UMKM dan pengenalan lembaga kredit mikro;
- b) Pengembangan Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional;
- c) Mendorong terbitnya Perda mengenai Pusat Industri Perikanan di Ambon dan Tual, Pengembangan 6 Kawasan Minapolitan, dan 6 Klaster Pengembangan Rumput Laut;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 262 -

- d) Mendorong pelaksanaan program Mega Minapolitan di Morotai;
- e) Meningkatkan aktivitas pengolahan rumput laut di Maluku Utara;
- f) Mengembangkan produksi olahan untuk meningkatkan nilai tambah;
- g) Meningkatkan akses permodalan dari perbankan dan lembaga keuangan lain untuk pelaku industri pengolahan perikanan.

2) Konektivitas (Infrastruktur)

Pengembangan Kegiatan Ekonomi Utama Perikanan juga memerlukan dukungan infrastruktur yang meliputi:

- a) Pengembangan sarana dan prasarana pemasaran hasil perikanan dalam negeri;
- b) Pengembangan 12 Pelabuhan Perikanan di Maluku (PPN: Tantai/Ambon & Dumar/Tual, PPI: Eri/Ambon, Taar/Tual, Amahai, Kayeli/Buru, Ukurlarang/MTB, Klishatu/Wetar, Kalar-kalar/Aru, PPP: Dobo, Tamher Timur/SBT, Piru/SBB); Pelabuhan Perikanan di Maluku Utara (Morotai) dan Sofifi;
- c) Penyediaan infrastruktur depot BBM dan sumber tenaga listrik;
- d) Pengembangan depo pemasaran rumput laut dan perikanan di Maluku Utara;
- e) Fasilitasi bantuan peralatan penangkapan ikan (kapal dan jaring penangkap) yang dilengkapi dengan Sistem Informasi Lokasi Penangkapan Ikan (satelit);
- f) Infrastruktur/konektivitas lainnya yang mendukung seluruh kegiatan Koridor Ekonomi Papua dan Kepulauan Maluku.

3) SDM dan IPTEK

Selain kebutuhan perbaikan regulasi dan dukungan infrastruktur, pengembangan Kegiatan Ekonomi Utama Perikanan juga perlu dukungan terkait pengembangan IPTEK dan sumber daya manusia, yaitu:

- a) Pembangunan unit pengolahan ikan, mesin dan peralatan pengolahan, laboratorium uji mutu dan penelitian dan pengembangan, *cold storage*, dan docking di Maluku dan Maluku Utara;
- b) Pendirian Pusat Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan di Ambon dan Morotai;
- c) Menyediakan pusat informasi sumber daya ikan berbasis teknologi di masing-masing desa nelayan;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

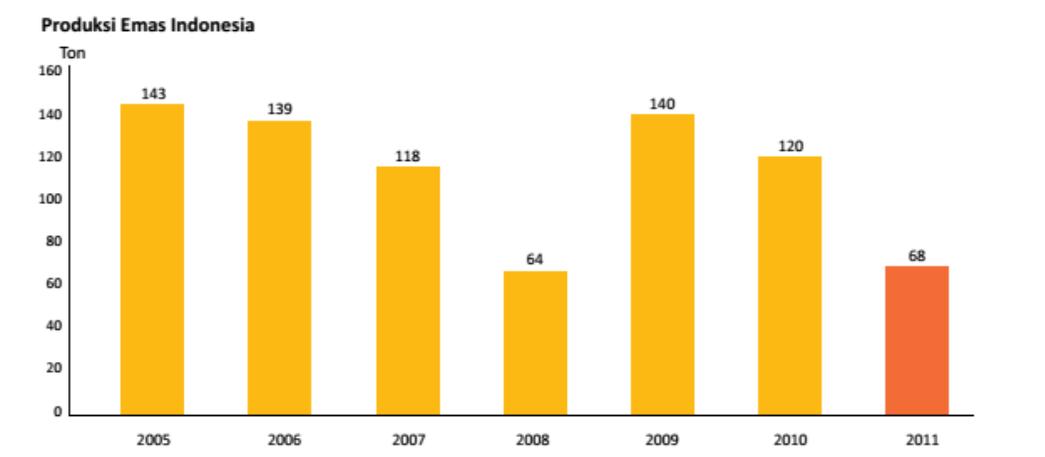
- 263 -

- d) Meningkatkan mutu produk perikanan melalui pelatihan, standarisasi, dan pengawasan mutu;
- e) Memberikan pelatihan diversifikasi hasil olahan ikan, penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap rawai dasar, penangkapan dan penanganan ikan tuna, budidaya rumput laut dan ikan kerapu di Maluku, Maluku Utara, dan Papua.

f. Kegiatan Ekonomi Lain

Selain Kegiatan Ekonomi Utama yang menjadi fokus Koridor Ekonomi Papua dan Kepulauan Maluku di atas, pada Koridor Ekonomi Papua dan Kepulauan Maluku juga terdapat beberapa kegiatan ekonomi yang dinilai mempunyai potensi pengembangan, seperti pariwisata di Raja Ampat dan pertambangan emas di Maluku Utara dan Papua. Selain cadangan tembaga yang melimpah, Papua juga memiliki sumber daya mineral emas yang melimpah. Indonesia menduduki peringkat ke-7 yang memiliki potensi emas terbesar didunia sebesar 6,7 persen dari total cadangan emas dunia. Pada tahun 2010, produksi emas Indonesia mencapai 120 Ton. Cadangan emas di Koridor Ekonomi Papua dan Kepulauan Maluku berada di wilayah Nabire dan Halmahera

Gambar 3.G.20:
Produksi Emas Indonesia



2. Investasi

Terkait dengan Pembangunan Koridor Ekonomi Papua dan Kepulauan Maluku, teridentifikasi rencana investasi baru untuk Kegiatan Ekonomi Utama Migas, Nikel, Perikanan, Pertanian Pangan, Tembaga serta infrastruktur pendukung sebesar IDR 488.550 Miliar.



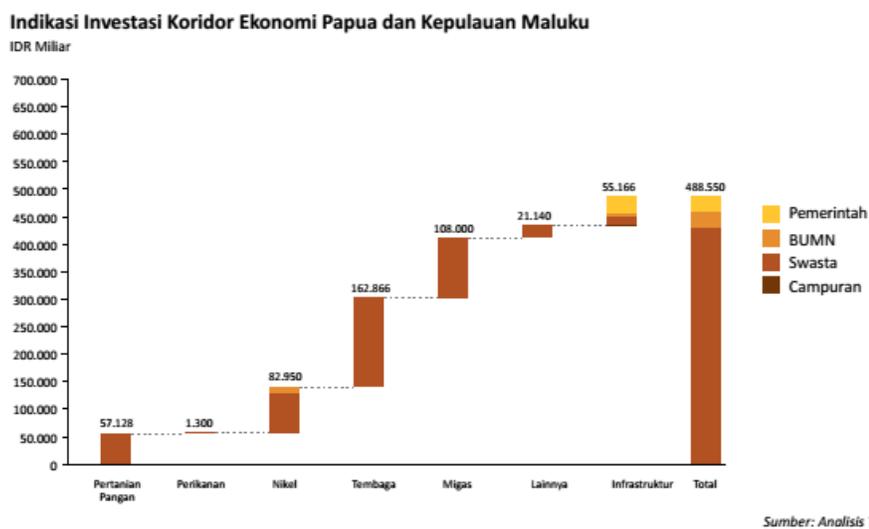
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 264 -

Berikut ini adalah gambaran umum investasi yang ada di Koridor Ekonomi Papua dan Kepulauan Maluku:

Gambar 3.G.21:

Indikasi investasi koridor ekonomi Papua dan Kep. Maluku



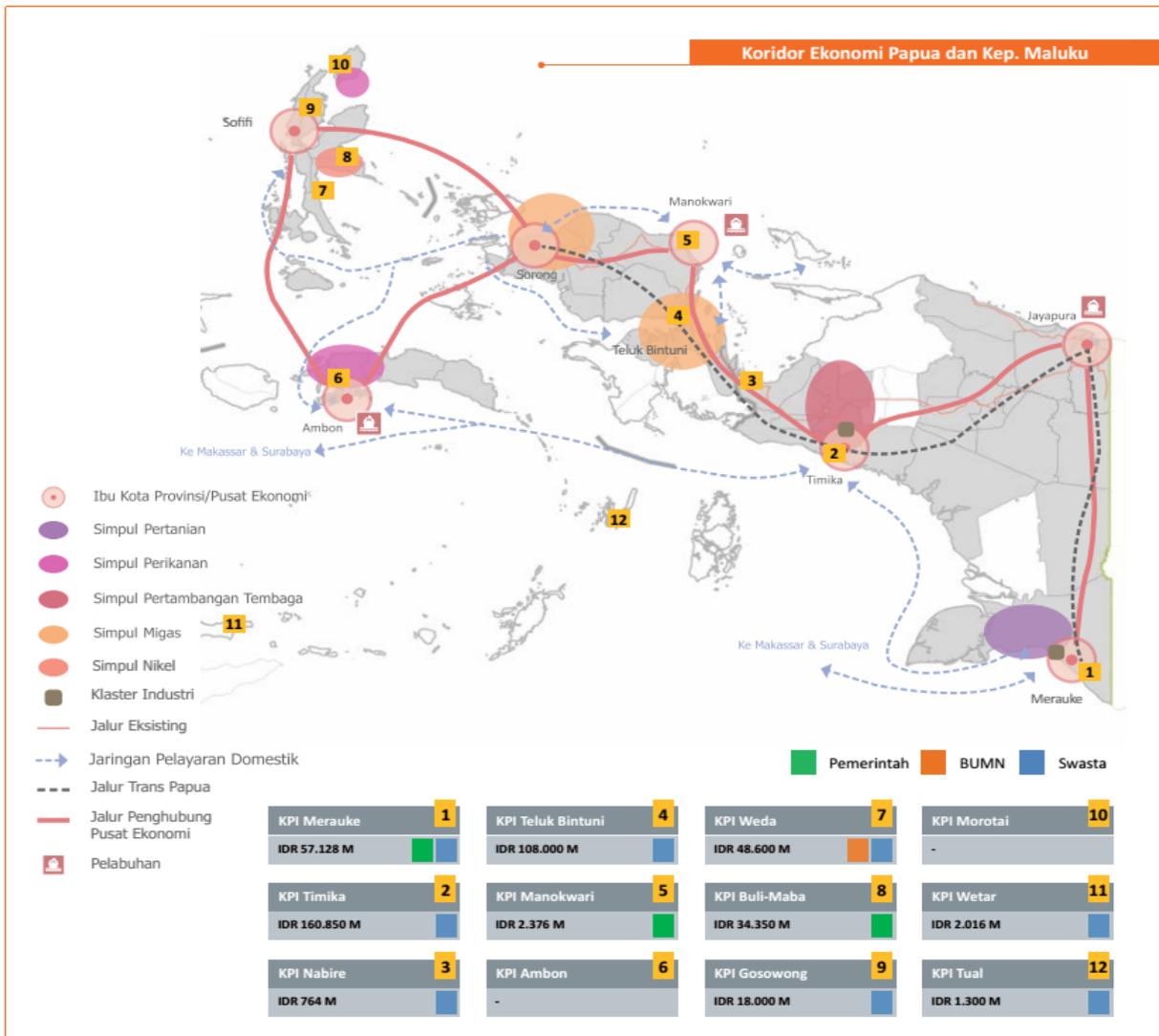
Investasi di sektor perikanan pada Koridor Ekonomi Papua dan Kepulauan Maluku masih sangat rendah dibandingkan dengan sektor utama lainnya (Pertambangan, Pertanian Pangan), sehingga perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan investasi sektor tersebut. Disamping itu, ada pula investasi dari beberapa kegiatan di luar 22 Kegiatan Ekonomi Utama yang dikembangkan di MP3EI seperti emas sebesar IDR 18,80 Triliun. Di samping investasi yang berkaitan dengan Kegiatan Ekonomi Utama di atas, Pemerintah dan BUMN juga berkomitmen untuk melakukan pembangunan infrastruktur di Koridor Ekonomi Papua dan Kepulauan Maluku



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 265 -

Gambar 3.G.22:
Pemetaan Investasi Berdasarkan Lokus Industri
di Koridor Ekonomi Papua – Kep. Maluku



Gambar 3.G.22: Pemetaan Investasi Berdasarkan Lokus Industri di Koridor Ekonomi Papua – Kep. Maluku

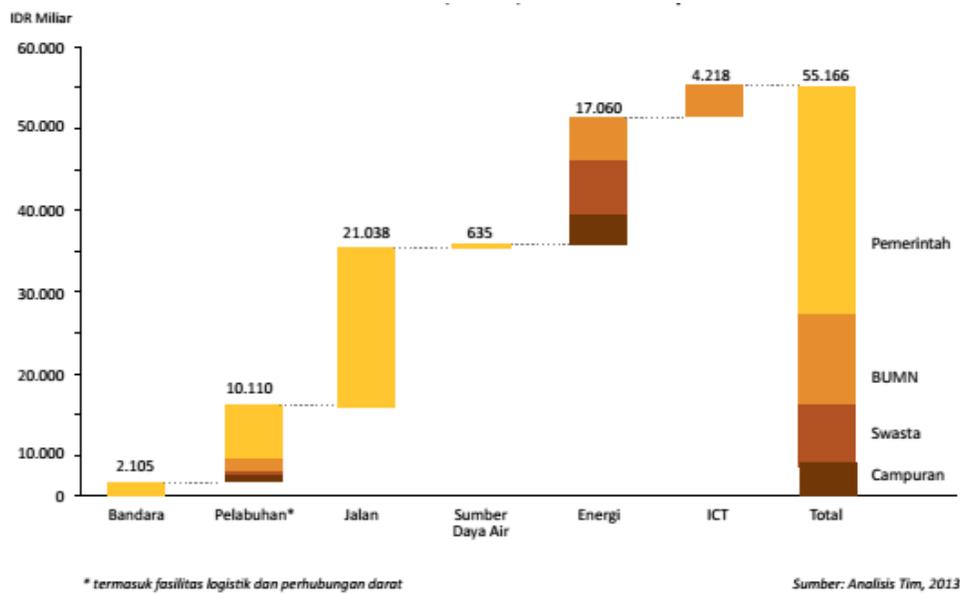
Gambar 3.G.23:



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 266 -

Indikasi Investasi Infrastruktur Koridor Ekonomi Papua dan Kepulauan Maluku (IDR Miliar) oleh Pemerintah, BUMN, Swasta dan Campuran



Untuk mendukung seluruh kegiatan sektor-sektor di Koridor Papua dan Kepulauan Maluku seperti yang telah diuraikan di atas, dibutuhkan infrastruktur lintas sektor berupa:

- a. Peningkatan dan perluasan Bandara Sentani di Jayapura, Bandara Mopah di Merauke, Bandara Timika, Bandara Sorong, Bandara Pattimura di Ambon, Bandara Morotai;
- b. Peningkatan dan Perluasan Pelabuhan Jayapura dan Depapre, Pelabuhan Manokwari, Pelabuhan Sorong dan T. Arar, Pelabuhan Yos Sudarso di Ambon;
- c. Pembangunan Jalan Trans-Papua;
- d. Peningkatan Jalan Kumbe – Okaba – Nakias (152 Km) Jalan Provinsi dan Kabupaten;
- e. Pembangunan PLTU Papua – Jayapura, PLTU Papua – Timika, PLTU Maluku – Ambon dan PLTU Maluku Utara;
- f. Pembangunan PLTP Merauke, PLTP Biak, PLTP Sorong, PLTP Jayapura, PLTP Andai, PLTP Nabire, PLTP Maluku Utara;
- g. Pembangunan backbone broadband dengan menggunakan kabel laut serat optik pada jalur Ambon – Jayapura, Sorong – Merauke, Fak-Fak – Saumlaki;
- h. Pengembangan dan pembangunan prasarana Balai Benih Ikan Pantai (BBIP) Bacan dan Balai Benih Ikan Air Tawar (BBIAT) Jailolo;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 267 -

- i. Pembangunan jaringan pendukung sistem telematika Koridor Ekonomi Papua dan Kepulauan Maluku (Jaringan Core, Jaringan Backhaul, Jaringan Akses/Lastmile, Network Operation Centre/NOC, *Regional Centre*, *Support Centre*, *Sub-system Service Control*, dan lain-lain).

Pembangunan Koridor Ekonomi Koridor Papua dan Kepulauan Maluku masih difokuskan pada pengembangan di masing-masing pusat ekonomi. Namun demikian, pembangunan konektivitas untuk beberapa pusat ekonomi tertentu, yaitu ruas Sofifi – Sorong dan Sofifi – Ambon – Sorong – Manokwari – Teluk Bintuni - Timika sudah perlu ditingkatkan untuk mendukung pembangunan ekonomi selanjutnya. Sebagai pusat ekonomi, di Ambon perlu diupayakan kegiatan hilir industri perikanan yang berorientasi ekspor sehingga mampu membuka lapangan pekerjaan melalui penciptaan pertambahan nilai industri. Pusat ekonomi di Sofifi perlu disinergikan dengan potensi Pulau Halmahera sebagai pusat kegiatan pertambangan nikel dan industri pengolahannya (smelter). Pusat ekonomi di Timika, perlu dikembangkan kegiatan pelayanan dan jasa pelayanan wilayah seperti pendidikan dan pertanian yang dapat berkembang lebih lama dari pertambangan yang saat ini menjadi basis perekonomian Timika. Pengembangan pusat ekonomi Merauke akan difokuskan pada pembangunan infrastruktur konektivitas dan infrastruktur pendukung agar MIFEE dapat segera produksi dan memperluas pasarnya. Struktur tata ruang Koridor Ekonomi Papua dan Kepulauan Maluku sampai dengan 2015 akan terfokus kepada penyiapan konektivitas dari Sofifi – Ambon – Sorong – Manokwari – Timika. Merauke dengan MIFEE-nya yang pada saat ini sudah berkembang, perlu ditunjang dengan penyiapan infrastruktur berskala internasional dengan dibangunnya pelabuhan udara dan laut disekitar Merauke. Konektivitas darat dari Timika – Jayapura – Merauke mulai dikembangkan setelah pusat-pusat ekonomi di setiap simpul koridor berkembang dengan baik. Ini dilakukan untuk mengimbangi besarnya investasi yang harus dikeluarkan dalam membangun konektivitas Timika – Jayapura – Merauke.

Pengembangan Kawasan Mamberamo sudah harus dimulai dari saat ini, karena Sungai Mamberamo menyimpan potensi bangkitan listrik yang sangat besar sehingga akan sangat menunjang kebutuhan listrik seluruh kegiatan di Papua bahkan Indonesia. Mengingat biaya yang dibutuhkan untuk pengembangan kawasan ini sangat besar sehingga mungkin diperlukan pelibatan sumber dana asing, maka pemerintah dapat memulai *feasibility study* pengembangan kawasan, sehingga dapat mempermudah memasarkan kawasan untuk menjaring investor.